

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa bentuk dan isi dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dalam pasal itu juga dijelaskan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh komite standar yang independen dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, kemudian ditetapkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

PP Nomor 24 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, lalu basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pada Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5

(lima) tahun sejak ditetapkannya undang-undang ini. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Penggunaan akuntansi berbasis akrual diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur tentang penggunaan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Basis akrual adalah suatu basis akuntansi yang mengakui, mencatat, dan menyajikan transaksi ekonomi pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan kapan arus kas masuk pada rekening kas umum negara atau arus kas keluar dari rekening kas umum negara.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. SAP diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Apabila terdapat pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual. PSAP dapat dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan/atau Buletin Teknis SAP yang disusun dan

diterbitkan oleh KSAP dan diberitahukan kepada pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam PSAP 07 diatur mengenai prinsip-prinsip akuntansi aset tetap. Aset tetap adalah salah satu komponen utama dalam sebuah organisasi untuk menjalankan operasional pemerintahan. Aset tetap sangat penting dalam menunjang aktivitas instansi pemerintahan karena aset tetap dapat berfungsi sebagai komponen pendukung dalam menjalankan suatu kegiatan sehingga dapat meningkatkan produktifitas suatu instansi pemerintahan. Tanpa aset tetap yang memadai, sebaik apapun program kerja dan pelayanan publik yang direncanakan dan dijalankan oleh pemerintah, tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Aset tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, yang membuat aset tetap menjadi signifikan dalam penyajian neraca.

Sesuai amanat Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah menyanggarkan akuntansi atas aset yang di dalamnya termasuk pengelolaan barang milik negara (BMN)/barang milik daerah (BMD). Pengelolaan BMN/BMD harus dilakukan secara akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Berdasarkan *website* BPK, dalam praktiknya masih ditemukan banyak masalah pada pengelolaan aset tetap. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2020, beberapa Pemerintah Daerah masih menyajikan aset tetap yang tidak sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintah. Selain itu terdapat beberapa Pemerintah Daerah yang menyajikan aset tetap tidak didukung dengan bukti yang cukup.

Bengkulu merupakan salah satu provinsi di Sumatera dengan luas wilayah 151,7 km. Pada tahun 2018-2020, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bengkulu mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian”. Meskipun berhasil meraih opini WTP, BPK menemukan permasalahan pengelolaan dan penatausahaan aset tetap yang masih belum optimal dalam mendukung penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu.

Dari uraian yang telah disampaikan, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan terhadap penerapan akuntansi aset tetap berbasis akrual pada Pemerintah Kota Bengkulu. Penulis akan melakukan tinjauan mengenai kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap yang diterapkan di Pemerintah Kota Bengkulu dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah yang berlaku. Hasil tinjauan tersebut akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir berjudul “TINJAUAN ATAS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Kota Bengkulu?
2. Bagaimana kesesuaian antara penerapan kebijakan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Kota Bengkulu dengan SAP?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk dapat memahami penerapan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Kota Bengkulu.
2. Untuk meninjau kesesuaian antara penerapan kebijakan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Kota Bengkulu dengan SAP.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup pembahasan dalam karya tulis ini berfokus pada Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020. Penulis akan memaparkan mengenai data dan fakta terkait penerapan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Kota Bengkulu dan landasan teori terkait hal tersebut, serta melakukan perbandingan antara praktik di lapangan dengan SAP.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah untuk:

1. Memberikan wawasan kepada penulis tentang bagaimana penerapan SAP dalam proses akuntansi aset tetap, khususnya di sebuah pemerintah daerah;
2. Memberikan referensi tambahan bagi pembaca maupun peneliti berikutnya terkait penerapan SAP tentang akuntansi aset tetap di sebuah pemerintah daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang dan alasan pemilihan pokok bahasan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang teori-teori terkait dengan akuntansi aset tetap. Teori-teori tersebut berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah, Buletin Teknis, dan Peraturan lainnya yang mengatur mengenai aset tetap. Dalam bab ini terdapat subbab yang terdiri atas definisi dan kriteria aset tetap, klasifikasi, prinsip pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai metode yang digunakan dalam pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, serta pembahasan hasil dari pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan. Pada subbab metode pengumpulan data menguraikan cara pengumpulan data yang digunakan . Pada subbab gambaran umum objek penulisan menyajikan profil umum, struktur organisasi, dan data terkait akuntansi aset tetap Pemerintah Kota Bengkulu. Pada subbab pembahasan hasil menyajikan pembahasan berupa tinjauan atas klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta penyajian dan pengungkapan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Kota Bengkulu.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini, Penulis akan menarik kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Penulis, Pembaca, pihak-pihak terkait, serta perkembangan pengetahuan yang ada di Indonesia.